

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan hasil dari pengembangan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat yang kegiatannya dilakukan oleh suatu negara, atau dengan kata lain pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan kenaikan perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan, sistem kelembagaan yang dimaksud adalah perbaikan dari setiap bidang seperti ekonomi, hukum, sosial dan budaya (Arsyad, 2010).

Sedangkan tolak ukur untuk keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Oleh sebab itu, setiap daerah selalu menetapkan target laju pertumbuhan yang tinggi didalam perencanaan dan tujuan pembangunan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Karena penduduk bertambah terus, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahunnya. Hal ini dapat terpenuhi lewat peningkatan output secara agregat baik barang maupun jasa setiap tahunnya (Tambunan, 2001). Pada pertumbuhan ekonomi terdapat tiga komponen penting, yaitu pertama adalah akumulasi modal, peralatan fisik, dan sumber daya manusia melalui perbaikan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ketrampilan kerja. Kedua, pertumbuhan jumlah penduduk yang akhirnya menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja. Ketiga, kemajuan teknologi atau cara-cara baru menyesuaikan pekerjaan (Todaro, 2006).

Negara yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya merupakan keberhasilan negara tersebut dalam pembangunan ekonominya. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang ada di suatu negara juga berkaitan langsung dengan adanya pembangunan ekonomi. Yang mana ketika pembangunan ekonomi dikaitkan dengan kenaikan pendapatan nasional, maka hal tersebut merupakan salah satu indikasi kenaikan pertumbuhan ekonomi pada negara tersebut (Boediono, 2005).

Sejak otonomi daerah di Indonesia diberlakukan menyebabkan setiap daerah meningkatkan pembangunan dan perekonomiannya menjadi luas. Selain itu setelah adanya otonomi tersebut, juga menimbulkan suatu permasalahan yaitu ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di setiap daerah. Menurut Todaro (2004), ketimpangan memiliki dampak yang positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari ketimpangan yaitu dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju dan berkembang untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya guna untuk meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan dampak negatif dari ketimpangan antara lain inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas. Dampak negatif dari ketimpangan inilah yang akan menjadi masalah pembangunan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Sehingga ketimpangan merupakan suatu tantangan pembangunan yang harus dihadapi karena dapat menyulitkan dalam melaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berlandaskan pemerataan.

Masalah ketimpangan itu sendiri merupakan salah satu permasalahan yang serius dan dapat ditemukan pada setiap daerah baik kota maupun kabupaten. Oleh karena itu, permasalahan ketimpangan hanya bisa dikurangi sampai pada tingkat

yang dapat diterima oleh suatu sistem sosial tertentu agar pemerataan tersebut tetap terpelihara dalam proses pertumbuhannya. Pemerataan pada suatu daerah dapat menyebabkan proses pertumbuhan daerah yang cepat, sedangkan jika tidak terjadi pemerataan pada daerah tersebut maka proses pertumbuhan daerahnya lambat. Maka daerah-daerah yang tidak mengalami pemerataan tersebut disebabkan kurangnya sumber-sumber yang dimiliki, adanya kecenderungan pemilik modal (investor) lebih memilih daerah yang memiliki sarana dan prasarana seperti perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi juga tenaga terampil (Barika, 2012). Dengan tidak meratanya investor yang masuk maka akan menimbulkan dampak negatif untuk daerah tersebut seperti kurangnya lapangan pekerjaan sehingga menyebabkan adanya pengangguran. Dan juga berdampak adanya ketimpangan distribusi pendapatan dari Pemerintah Pusat atau Propinsi kepada daerah seperti kota atau kabupaten (Kuncoro, 2004).

Adapun hipotesis kuznets yang mengungkapkan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi cenderung akan lebih terpusat pada sektor industri modern, lapangan pekerjaan cenderung terbatas tetapi upah yang diterima dan tingkat produktivitas terhitung tinggi. Pada tahap awal ketimpangan pendapatan antara sektor industri modern dengan sektor pertanian mengalami peningkatan dengan cepat namun sebelum kemudian mengalami penyusutan. Ketimpangan pendapatan cenderung lebih tinggi pada daerah dengan sektor industri modern dari pada suatu daerah yang menggunakan sektor pertanian yang relatif tetap (Todaro, 2006). Dengan kata lain bahwa pada awal pertumbuhan ekonomi di negara berkembang cenderung menyebabkan terjadinya distribusi pendapatan yang semakin tidak

merata atau dengan kata lain meningkatnya ketimpangan pendapatan. Akan tetapi pada tahap selanjutnya pertumbuhan ekonomi pada negara tersebut mengalami kemajuan dan berdampak distribusi pendapatan yang semakin merata atau dengan kata lain ketimpangan pendapatannya menurun. Hal tersebut dikenal sebagai kurva Kuznets atau kurva U terbalik. Dimana pada sisi kiri kurva menunjukkan pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan ketidakmerataan pendapatan atau ketimpangan dan sisi kanan menunjukkan pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan pemerataan pendapatan atau mengurangi ketimpangan.

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu dari sepuluh provinsi yang terletak di pulau Sumatera, yang mana provinsi Sumatera Barat ini terdiri dari 7 kota dan 12 kabupaten. Jika dilihat dari jumlah kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat tentu saja terjadi ketimpangan baik dari segi pendapatan maupun pertumbuhan ekonomi yang akan mempengaruhi pembangunan pada daerah tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, PDRB provinsi Sumatera Barat tahun 2013-2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dimana PDRB provinsi Sumatera Barat pada tahun 2013 sebesar Rp 125.940 miliar dan tahun 2017 sebesar Rp 155.963 miliar. Perbedaan ini menunjukkan nilai PDRB di Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan setiap tahunnya yang cukup signifikan, maka hal ini tentu merupakan pencapaian yang cukup baik. Kondisi ini disebabkan karena pada setiap wilayah di provinsi Sumatera Barat menetapkan target laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai salah satu tujuan pembangunan wilayahnya. Kegiatan perekonomian pada suatu daerah dapat dikatakan mengalami suatu kemajuan jika tingkat pertumbuhan ekonomi pada saat ini lebih tinggi dibandingkan yang dicapai pada masa

sebelumnya, dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi maka suatu wilayah dapat mencapai kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah Sumatera Barat mengindikasikan terjadinya peningkatan terhadap aktivitas ekonomi. Namun tidak dapat dipungkiri juga hal tersebut akan menyebabkan terjadi ketimpangan di setiap kabupaten/kota, karena penyebab pertumbuhan ekonomi meningkat tersebut di pengaruhi oleh meningkatnya kegiatan di berbagai sektor. Kegiatan pada sektor-sektor tersebut hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu sehingga tidak seluruh masyarakat merasakan kenaikan pertumbuhan ekonomi tersebut. Maka oleh sebab itu adanya dugaan ketimpangan yang terjadi di setiap kabupaten atau kota pada Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2013 samapai tahun 2017.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu daerah dalam pelaksanaan pembangunan ekonominya, dapat dikatakan berhasil jika pada suatu daerah dapat meningkatkan taraf hidup masyarakatnya secara merata. IPM berkaitan dengan tingkat produktivitas penduduk, dimana jika semakin rendah IPM maka tingkat produktivitas penduduk juga akan rendah yang akan mengakibatkan pendapatan menjadi rendah, tetapi jika semakin tinggi IPM maka akan semakin tinggi pula tingkat produktivitas penduduk yang kemudian akan mendorong tingkat pendapatan menjadi semakin tinggi. Permasalahan yang terjadi disini adalah nilai IPM pada tiap daerah itu berbeda, seperti rata-rata nilai IPM provinsi Sumatera Barat tahun 2013-2017 menunjukkan bahwa rata-rata nilai IPM antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat terdapat perbedaan pada tiap tahunnya. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Sumatera Barat,

dimana rata-rata IPM Provinsi Sumatera Barat tahun 2013 sebesar 68,91% dan pada tahun 2017 sebesar 71,24%. Dan selain itu perbedaan ini dapat menjadikan IPM sebagai salah satu alat untuk mengukur ketimpangan pendapatan.

Untuk mengetahui besarnya ketimpangan distribusi pendapatan suatu daerah umumnya menggunakan indikator ketimpangan pendapatan yaitu Gini Ratio. Nilai Gini Ratio terletak antara 0 (kemerataan sempurna) sampai 1 (ketidakmerataan sempurna). Sedangkan koefisien gini ketidakmerataan sedang berkisar antara 0,36-0,49, ketidakmerataan tinggi berkisar 0,50-0,70 dan ketidakmerataan rendah berkisar antara 0,20-0,35 (Arsyad,2010).

Tabel 1.1 : Gini Ratio Sumatera Barat Tahun 2013-2017

Tahun	Gini Ratio
2013	0,36
2014	0,33
2015	0,34
2016	0,33
2017	0,31
Rata-rata	0,33

Sumber: Badan Pusat Statistik 2017

Berdasarkan Tabel 1.1 maka rata-rata Gini Ratio Sumatera Barat tahun 2013-2017 sebesar 0,33%. Dari rata – rata tersebut dapat diketahui bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Sumatera Barat selama lima tahun terakhir berada pada ketidakmerataan sedang karena masih dibawah angka 0,50%. Maka hal ini sesuai dengan kurva Kuznets, dimana Provinsi Sumatera Barat berada pada posisi di sebelah kiri. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2013-2017 mengalami peningkatan akan tetapi distribusinya semakin tidak merata atau timpang, diperlihatkan dengan rata-rata gini rasionya sebesar 0,33. Sehingga sangat diperlukan suatu kajian secara ilmiah agar peningkatan

pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat ketimpangan serta menghindari kemungkinan terjadinya peningkatan ketimpangan pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas maka peneliti tertarik dan menganggap penting untuk melakukan penelitian mengenai ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat beserta faktor- faktor yang mempengaruhi ketimpangan tersebut. Maka penulis mengangkat topik dalam penelitian ini dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2017“**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang, penulis mencoba untuk mengidentifikasi masalah yang akan diteliti pada penelitian ini dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2013-2017?
2. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2013-2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang serta rumusan masalah maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2013-2017.
2. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2013-2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak antara lain:

1. Bagi penulis sendiri, untuk menambah pengetahuan baru tentang penelitian yang berkaitan dengan ketimpangan distribusi pendapatan dan juga sebagai syarat guna memperoleh gelar S1 Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas.
2. Bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, menjadi sumber informasi dalam membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pemerataan distribusi pendapatan di daerah agar kesejahteraan masyarakat meningkat.
3. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat menambah pengetahuan dan sebagai sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis pada masa yang akan datang.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan menganalisis tentang pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder tahun

2013 sampai dengan 2017 dengan menggunakan data panel yang terdiri dari data *cross section* dan data *time series* dengan model regresi berganda. Jumlah *cross section* sebanyak 12 kabupaten dan 7 kota di provinsi Sumatera Barat. Dan data *time series* dalam penelitian ini memakai 5 tahun yaitu dari tahun 2013 sampai 2017.

1.6 Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan pada penelitian ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki korelasi topik yang sama dan menjelaskan tentang perbedaan dengan penelitian ini dan Teori yang digunakan pada penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas jenis dan sumber data, definisi operasional variabel, metode pengumpulan data, metode analisis yang digunakan dan cara pengolahan data secara terperinci.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang pemaparan data dan hasil analisis data yang telah diolah.

BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Pada bab ini tentang kesimpulan dan implikasi, serta saran yang dapat diambil berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada bagian sebelumnya.